“PERTUMBUHAN NEGARA PRIMER”

Jefry Jamka

Jefryjamka0619@gmail.com

2010003600164

Universitas Ekasakti

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok dari negara dan hukum negara pada umumnya. Pengertian menitik beratkan pada suatu pengetahuan, sedangkan sendi menitik beratkan pada suatu asas atau kebenaran. Kranenburg berpendapat bahwa Ilmu Negara merupakan cabang penyelidikan ilmiah yang masih muda walaupun menurut sifat dan hakekatnya merupakan cabang ilmu pengetahuan yang tua karena sebenarnya Ilmu Negara sudah dikenal sebagai suatu ilmu pengetahuan sejak zaman Yunani Kuno. Ilmu negara mempelajari negara secara umum, mengenai asal-usulnya, wujudnya, lenyapnya, perkembangannya dan jenis-jenisnya. Selain itu, Prof. M. Nasroen, SH, menyatakan bahwa Ilmu Negara Umum adalah suatu ilmu pengetahuan tertentu. Sebagai suatu ilmu pengetahuan, maka Ilmu Negara Umum akan mencari dan menetapkan suatu ketentuan dan kebenaran terhadap pokok penyelidikannya, yaitu negara. Jadi, Ilmu Negara Umum harus menjawab pertanyaan mengenai negara.

Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independen. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapat tentang apa itu negara, seperti Prof. Soenarko berpendapat bahwa Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai *souverien* (kedaulatan). Dan menurut Prof. R. Djoko Soetono, SH Negara adalah organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada dibawah pemerintahan yang sama. Sedangkan Menurut kamus besar bahasa indonesia pengertian negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. secara umum yaitu suatu daerah tertentu, yang ditempati oleh sekumpulan orang. Dikelola orang seorang pemimpin yang diakui oleh bawahannya sebagai pemilik kedaulatan.

Negara memiliki tujuan utama yaitu memajukan kesusilaan manusia baik sebagai individu maupun kelompok. Hal ini untuk membentuk manusia yang beradab, beretika, dan bermoral. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara harus menegakkan seperangkat nilai yang wajib dipatuhi oleh seluruh warganya. Para ahli juga mendefinisikan tujuan negara secara umum. Roger H Soltau dalam *An Introduction to Politics* (1951) menjelaskan tujuan negara yakni Memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Sementara itu Harold J Laski berpendapat dalam *The State in Theory and Practice*

(1947) menjelaskan tujuan negara untuk Menciptakan keadaan di mana rakyat dapat mencapai keinginan-keinginan mereka secara maksimal.

Dalam teori ini dikandung pengertian bahwa urutan pentahapan yang berkembang dari hal yang sangat sederhana dari terjadinya negara sampai kepada lahirnya negara yang modern. Memang untuk memahami terjadinya negara banyak dasar-dasar ataupun teori-teori yang dikemukakan para ahli negara dan hukum. Uraian disini akan mengambil sikap guna memahami pentahapan yang berkembang sehingga muncul apa yang disebut negara itu. Dewasa ini banyak pakar sejarah maupun kenegaraan yang mempercayai mengenai terjadinya negara melalui proses primer dan sekunder. Terjadinya negara secara primer yaitu awal mula terjadinya negara karena keluarga yang memiliki kebutuhan masing-masing yang kemudian berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Secara primer, negara terjadi melalui beberapa tahapan dan tidak ada hubungan dengan negara yang telah berdiri sebelumnya. Biasanya dimulai dari masyarakat hukum yang paling sederhana kemudian semakin berkembang dan kompleks. Dalam makalah ini penulis akan mencoba menjelaskan apa itu pertumbuhan negara secara primer, serta factor - faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan negara primer tersebut.

B. Rumusan Masalah.

1. Apa itu pertumbuhan negara primer

C. Tujuan Masalah.

1. Untuk mengetahui apa itu pertumbuhan negara primer.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Negara primer.

PEMBAHASAN

A. Pengertian negara

Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independen. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapat tentang apa itu negara, seperti Prof. Soenarko berpendapat bahwa Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai *souverien* (kedaulatan). Dan menurut Prof. R. Djoko Soetono, SH Negara adalah organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada dibawah pemerintahan yang sama. Sedangkan Menurut kamus besar bahasa indonesia pengertian negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. secara umum yaitu suatu daerah tertentu, yang ditempati oleh sekumpulan orang. Dikelola orang seorang pemimpin yang diakui oleh bawahannya sebagai pemilik kedaulatan.

Adapun teori yang mempengaruhi pertumbuhan negara yaitu:

1. Teori kontrak sosial (*social contract*)/ Teori Perjanjian Masyarakat

Teori perjanjian merupakan bentuk perlawanan atas kekuasaan raja ataupun penguasa yang menganggap memiliki kekuasaan mutlak akibat kepercayaan sebagai titisan Tuhan. Teori perjanjian ini ada dimasa abad pencerahan dan dipelopori oleh ahli ahli seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau.

2. Teori Ketuhanan

Teori ketuhanan adalah teori yang ada saat agama - agama besar telah tersebar ke dunia ini contohnya Islam dan Kristen. Teori ini sesuai namanya tentu saja dipengaruhi oleh paham keagamaan. Dan berdasarkan itulah, teori ketuhanan terbentuknya negara didasari anggapan bahwa negara terbentuk atas dasar keinginan Tuhan.

3. Teori kekuatan

Negara yang pertama adalah hasil dominasi dari komunikasi yang kuat terhadap kelompok yang lemah, Negara terbentuk dengan penaklukan dan pendudukan. Dengan penaklukan dan pendudukan dari suatu kelompok etnis yang lebih kuat atas kelompok etnis yang lebih lemah, dimulailah proses pembentukan Negara.

4. Teori Organisme

Menurut Dede Rosyada, dkk (2005: 54) mengemukakan konsepsi organisme tentang hakikat dan asal mula negara adalah suatu konsep biologis yang melukiskan negara dengan istilah-istilah ilmu alam. Negara dianggap

atau disamakan dengan makhluk hidup, manusia atau binatang individu yang merupakan komponen-komponen Negara dianggap sebagai sel-sel dari makhluk hidup itu.

5. Teori Historis

Teori ini menyatakan bahwa lembaga-lembaga sosial tidak dibuat, tetapi tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia.

6. Teori kedaulatan hukum

Teori kedaulatan hukum (*Rechts souvereiniteit*) (Mienou, 2010) menyatakan semua kekuasaan dalam negara berdasar atas hukum. Pelopor teori ini adalah H. Krabbe dalam buku *Die Moderne Staats Idee*.

7. Teori Hukum Alam

Teori hukum alam adalah teori awal tentang terbentuknya suatu negara. Teori ini menurut sejarah ada pada zaman Plato dan Aristoteles. Menurut teori ini, terjadinya negara adalah hal yang natural atau alami.

B. Negara Primer

Secara primer suatu negara terbentuk diawali dengan adanya kebutuhan dan kesadaran bersama bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat memenuhi segala kebutuhan hidup tanpa bantuan orang lain. Untuk itu manusia harus bekerjasama dengan manusia lain.

Untuk mempertahankan kelangsungan hidup, manusia membentuk kelompok yang dinamakan keluarga. Dari keluarga, kemudian terus berkembang menjadi kelompok masyarakat hukum yang dinamakan suku. Sebuah suku dipimpin oleh seorang kepala suku yang berperan sebagai primus inter pares, artinya orang yang pertama di antara yang sederajat. Dari satu suku kemudian berkembang menjadi dua suku, tiga suku, dan seterusnya menjadi semakin kompleks dan besar.

Terbentuknya kelompok besar ini didasari adanya persamaan nasib, persamaan budaya dan lain sebagainya. Kelompok ini kemudian dipimpin oleh seorang diantara mereka yang dianggap terkemuka yang disebut raja. Dalam perkembangannya kemudian muncul suatu gagasan dari tiap-tiap kelompok, mempunyai keinginan untuk memiliki kekayaan, seperti tanah, harta benda lainnya. Dengan adanya keinginan-keinginan tersebut kemudian mendorong tumbuhnya kesadaran untuk membentuk negara untuk mengorganisir berbagai kepentingan tersebut. Warga negara kemudian memilih seorang pemimpin. Dengan terpilihnya seorang pemimpin, maka rakyat menyerahkan kekuasaan tertinggi kepada pemimpin tersebut.

C. Tahap-tahap pertumbuhan negara secara primer

Terjadinya negara secara primer yaitu awal mula terjadinya negara karena keluarga yang memiliki kebutuhan masing-masing yang kemudian berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi.

primer, negara terjadi melalui beberapa tahapan dan tidak ada hubungan dengan negara yang telah berdiri sebelumnya. Biasanya dimulai dari masyarakat hukum yang paling sederhana kemudian semakin berkembang. Berikut beberapa tahapan pertumbuhan negara secara primer.

Yang dimaksud dengan terjadinya negara secara primer (Primaries Wording) adalah teori yang membahas tentang terjadinya negara yang tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Terjadinya negara secara primer dimulai dari masyarakat yang paling sederhana kemudian berevolusi ketingkat yang lebih maju.

Menurut teori ini perkembangan negara secara primer melalui fase :

1. Fase Genootschap (kelompok)

Pada fase ini merupakan pengelompokkan dari orang-orang yang menggabungkan diri untuk kepentingan bersama, dan didasarkan pada persamaan. Awal kehidupan manusia dimulai dari keluarga, kemudian terus berkembang menjadi kelompok-kelompok masyarakat hukum tertentu (suku). Suku sangat terkait dengan adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan yang disepakati. Pimpinan suku (kepala suku atau kepala adat) berkewajiban mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bersama. Mereka menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama dan kepemimpinan disini dipilih secara primus inter pares. Peranan kepala suku dianggap sebagai primus inter pares, artinya orang yang pertama diantara yang sederajat. Kemudian, satu suku, terus berkembang menjadi dua, tiga suku, dan seterusnya menjadi besar dan kompleks. Perkembangan tersebut bisa terjadi

karena faktor alami atau karena penaklukan-penaklukan antar suku. Jadi yang penting pada masa ini adalah unsur bangsa.

2. Fase Reich/Rijk (Kerajaan)

Pada fase ini orang-orang yang menggabungkan diri telah sadar akan hak milik atas tanah hingga muncullah tuan yang berkuasa atas tanah dan orang-orang yang menyewa tanah. Sehingga timbul sistem feodisme. Kepala suku yang semula berkuasa di masyarakat hukumnya kemudian mengadakan ekspansi dengan penaklukan-penaklukan ke daerah lain. Hal ini mengakibatkan berubahnya fungsi kepala suku dari primus inter pares menjadi seorang raja dengan cakupan wilayah yang lebih luas dalam bentuk kerajaan. Pada tahap berikutnya karena faktor sarana transportasi dan komunikasi yang tidak lancar, banyak daerah taklukannya yang memberontak. Menghadapi keadaan demikian, raja segera bertindak dengan mencari dan sebanyak-banyaknya melalui perdagangan untuk membeli senjata guna membangun tentara yang kuat dan sarana vital lainnya. Dengan tentara yang kuat, raja menjadi berwibawa terhadap daerah-daerah kekuasaannya sehingga mulai tumbuh kesadaran akan kebangsaan dalam bentuk negara nasional.

3. Fase Staat (Negara)

Pada fase ini masyarakat telah sadar dari tidak bernegara menjadi bernegara dan mereka telah sadar bahwa mereka berada pada satu kelompok. Pada awalnya negara nasional diperintah oleh raja yang absolute dengan sistem pemerintah terpusat. Semua rakyat dipaksa mematuhi kehendak dan perintah raja. Hanya ada satu identitas kebangsaan. Jadi yang penting pada

masa ini adalah bahwa unsur daripada negara ialah bangsa. Wilayah dan pemerintah yang berdaulat sudah terpenuhi.

4. Fase Democratische Natie (Demokrasi)

Fase ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari fase staat, dimana democratische natie ini terbentuk atas dasar kesadaran demokrasi nasional kesadaran akan adanya kedaulatan ditangan rakyat. Secara bertahap rakyat mempunyai kesadarn batin dalam bentuk perasaan kesadaran adanya kekuasaan raja yang mutlak menimbulkan keinginan rakyat untuk memegang pemerintahan sendiri, diman kedaulatan / kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Rakyat berhak memilih pimpinannya sendiri yang dianggap dapat mewujudkan aspirasi mereka. Ini dikenal dengan kedaulatan rakyat. Pemikiran seperti ini mendorong lahirnya negara demokrasi.

5. Fase Diktatuur (Diktator)

Pada fase ini, pemerintahan yang dipilih oleh rakyat secara demokratis berubah menjadi pemerintahan yang diktator. Diktator adalah seorang pemimpin negara yang memerintah secara otoriter/tirani dan menindas rakyatnya. Biasanya seorang diktator naik takhta dengan menggunakan kekerasan, sering kali dengan sebuah kudeta. Tetapi ada pula diktator yang naik takhta secara demokratis. Contoh yang paling terkenal adalah Adolf Hitler.

Mengenai fase diktatuur ini timbul dua pendapat yaitu :

1. Menurut sarjan Jerman

Mereka berpendapat bahwa bentuk diktatuur ini merupan perkembangan lebih lanjut daripada democratische natie.

2. Menurut sarjana lainnya

Mereka berpendapat bahwa diktatuur ini bukanlah merupakan perkembangan lebih lanjut daripada democratie natie tapi merupakan variasi atau penyelewengan daripada democratische natie.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independen. Terjadinya Negara menurut para sejarawan dan kenegaraan dibedakan atas dua macam, yaitu Primer dan sekunder. Pertumbuhan negara secara primer yaitu dimulai karena keluarga yang memiliki kebutuhan masing-masing yang kemudian berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi.

Secara primer, negara terjadi melalui beberapa tahapan dan tidak ada hubungan dengan negara yang telah berdiri sebelumnya. Biasanya dimulai dari masyarakat hukum yang paling sederhana kemudian semakin berkembang.

Secara primer suatu negara terbentuk diawali dengan adanya kebutuhan dan kesadaran bersama bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat memenuhi segala kebutuhan hidup tanpa bantuan orang lain. Untuk itu manusia harus bekerjasama dengan manusia lain.

Untuk mempertahankan kelangsungan hidup, manusia membentuk kelompok yang dinamakan keluarga. Dari keluarga, kemudian terus berkembang menjadi kelompok masyarakat hukum yang dinamakan suku. Sebuah suku dipimpin oleh seorang kepala suku yang berperan sebagai primus inter pares, artinya orang yang pertama di antara yang sederajat. Dari satu suku kemudian

berkembang menjadi dua suku, tiga suku, dan seterusnya menjadi semakin kompleks dan besar.

Ada berapa tahapan yang mempengaruhi pertumbuhan negara secara primer yaitu Fase Genootschap (kelompok), Fase Reich/Rijk (Kerajaan), Fase Staat (Negara), Fase Democratische Natie (Demokrasi), Fase Diktatuur (Diktator). Dari lima fase (Tahapan) itulah yang mempengaruhi pertumbuhan negara, sehingga terbentuklah suatu negara yang terjadi secara primer.

DAFTAR PUSTAKA

Darmini Roza dan Laurensius Arliman S Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Volume 47, Nomor 1, 2018.

Laurensius Arliman S, Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana, Deepublish, Yogyakarta, 2015.

Laurensius Arliman S, Penguatan Perlindungan Anak Dari Tindakan Human Trafficking Di Daerah Perbatasan Indonesia, Jurnal Selat, Volume 4, Nomor 1, 2016.

Laurensius Arliman S, Problematika Dan Solusi Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Sebagai Tersangka Tindak Pidana Di Satlantas Polresta Pariaman, Justicia Islamica, Volume 13, Nomor 2, 2016.

Laurensius Arliman S, Pelaksanaan Perlindungan Anak Yang Tereksplotasi Secara Ekonomi Oleh Pemerintah Kota Padang, Veritas et Justitia, Volume 2, Nomor 1, 2016.

Laurensius Arliman S, Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Lex Jurnalica, Volume 13, Nomor 3, 2016.

Laurensius Arliman S, Komnas Perempuan Sebagai State Auxialiary Bodies Dalam Penegakan Ham Perempuan Indonesia, Justicia Islamica, Volume 14, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, Peranan Pers Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Berkelanjutan Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Volume 2, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum, Jurnal Hukum Doctrinal, Volume 2, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, Participation Non-Governmental Organization In Protecting Child Rights In The Area Of Social Conflict, The 1st Ushuluddin and Islamic Thought International Conference (Usicon), Volume 1, 2017.

Laurensius Arliman S, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia, Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, Volume 10, Nomor 1, 2017, <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.379>.

Laurensius Arliman S, Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak, Jurnal Respublica Volume 17, Nomor 2, 2018.

Laurensius Arliman S, Menjerat Pelaku Penyuruh Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Dengan Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial, Jurnal Gagasan Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2019.

Laurensius Arliman S, Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia, Deepublish, Yogyakarta, 2019.

Laurensius Arliman S, Isdal Veri, Gustiwarni, Elfitrayenti, Ade Sakurawati, Yasri, Pengaruh Karakteristik Individu, Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Kualitas Pelayanan Komnas Perempuan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Mediasi, Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi, Volume 6, Nomor 2, 2020.

Laurensius Arliman S, Pendidikan Kewarganegaraan, Deepublish, Yogyakarta, 2020.

Laurensius Arliman S, Makna Keuangan Negara Dalam Pasal Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945, Jurnal Lex Librum, Volume 6, Nomor 2 Juni 2020, <http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v6i2.151>.

Laurensius Arliman S, Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum, Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 7, 2020.

Laurensius Arliman S, Pelaksanaan Assesment Oleh Polres Kepulauan Mentawai Sebagai Bentuk Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Jurnal Muhakkamah, Volume 5, Nomor 1, 2020.

Laurensius Arliman S, Aswandi Aswandi, Firgi Nurdiansyah, Laxmy Defilah, Nova Sari Yudistia, Ni Putu Eka, Viona Putri, Zakia Zakia, Ernita Arief, Prinsip, Mekanisme Dan Bentuk Pelayanan Informasi Kepada Publik Oleh Direktorat Jenderal Pajak, Volume 17, No Nomor, 2020.

Larensius Arliman S, Koordinasi PT. Pegadaian (Persero) Dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar Dalam Penimbangan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika, UIR Law Review, Volume 4, Nomor 2, 2020, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4\(1\).3779](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4(1).3779).

Laurensius Arliman S, Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0, Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020.

Muhammad Afif dan Laurensius Arliman S, Protection Of Children's Rights Of The Islamic And Constitutional Law Perspective Of The Republic Of Indonesia,

Proceeding: Internasional Conference On Humanity, Law And Sharia (Ichlash),
Volume 1, Nomor 2, 2020.

Otong Rosadi dan Laurensius Arliman S, Urgensi Pengaturan Badan Pembinaan
Ideologi Pancasila Berdasarkan Undang-Undang Sebagai State Auxiliary Bodies yang
Merawat Pancasila dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Prosiding Konferensi
Nasional Hak Asasi Manusia, Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19: Tantangan untuk Keilmuan Hukum dan
Sosial Volume 1, Universitas Pancasila, Jakarta, 2020.